

MODUS OPERANDI
YANG TERUNGKAP:

- **"Ijon" Proyek:**
Anggota DPRD menerima setoran awal dari koordinator pokmas sebagai komitmen atas pengusulan dana hibah.
- **Peran Anggota DPRD sebagai Pengusul:**
Anggota DPRD mengusulkan pokmas sebagai penerima dana hibah, yang kemudian dikelola oleh koordinator lapangan atau pihak swasta.
- **Peran Anggota DPRD sebagai Pengusul:**
Anggota DPRD mengusulkan pokmas sebagai penerima dana hibah, yang kemudian dikelola oleh koordinator lapangan atau pihak swasta.
- **Pemotongan Dana:**
Dana hibah yang cair dipotong persentasenya (diduga 20-30%) oleh pihak-pihak yang terlibat.
- **Pokmas Fiktif:**
Ditemukan pokmas fiktif/duplikat dan 757 rekening identik.
- **Pengkondisian Proyek:**
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan proposal karena adanya pengkondisian proyek oleh pihak luar.
- **Pembelian Aset:**
Dana hasil korupsi diduga digunakan untuk membeli aset seperti tanah, rumah, bahkan lahan tambang pasir.

EDISI SELASA, 22 JULI 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02
04
10

GOVERNMENT
Presiden Kenalkan "Serakahnomics"

NUSANTARA
Karhutla Sumatera Jadi Sorotan Internasional

LISTSTYLE
Cuci Muka Pakai Es Batu,
Tren Baru Bikin Kulit Sehat

CELAH KORUPSI DANA HIBAH JATIM

Kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus bergulir karena beberapa alasan kompleks yang mencakup skema korupsi berlapis, banyaknya pihak yang terlibat, dan upaya serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap tuntas kasus ini. Bahkan, kali ini KPK mengupas celah-celah yang dianggap sebagai tantangan serius dalam penyalurannya. Dari celah-celah inilah yang membuka potensi besar terjadinya korupsi sehingga mengakibatkan kebocoran anggaran pemerintah. Terlebih lagi, anggaran yang dialokasikan untuk dana hibah ini tidak sedikit dan mencapai triliunan rupiah. Dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jatim ini, KPK menemukan data-data sebagai bukti akan kelemahan di berbagai aspek dalam penyalurannya.

BACA HAL 11...

DANA HIBAH

KPK
KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI



Presiden Kenalkan "Serakahnomics"



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin (21/7/2025). Foto: BPMI Setpres

Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan istilah "serakahnomics" untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.

akan saya menggiling-ggiling padi itu. Saya akan saya dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan," ujar Presiden Prabowo.

Menurut laporan yang diterima Presiden Prabowo, potensi kerugian akibat praktik semacam itu bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, kata Presiden, seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.

"Kalau kita tertibkan ini, kita punya RP100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaikan 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaikan semua sekolah di seluruh Indonesia," ungkap Presiden Prabowo.

Terkait dengan distribusi pangan, Presiden menyatakan bahwa praktik curang dalam distribusi pangan kini dapat dilacak dengan cepat berkat laboratorium mutu di daerah dan teknologi hingga kecerdasan buatan. Namun menurutnya, kekuatan utama bangsa terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai senjata pamungkas dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu.

"Saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan

rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih," pungkas Presiden Prabowo dengan optimis.

Dalam kesempatan itu, dan masih terkait dengan sektor pangan, Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit

Prabowo, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

"Beras biasa dibungkus dikasih stem pel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," kata Prabowo.

Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. "Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita

masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita," tegas Presiden.

Presiden juga menerima laporan bahwa praktik pengoplosan beras bukan hal baru dan telah beberapa kali ditindak. Namun, praktik tersebut

kembali muncul dan terjadi secara berulang, mirip dengan pola yang pernah terjadi dalam distribusi minyak goreng.

"Sama dengan apa itu minyak goreng ya, botol dikurangi 10 persen, 20 persen. Besar loh 20 persen. Dari sekian juta ton, ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini," kata Presiden.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak tegas pengoplosan beras. "Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Dalam pelaksanaannya, kata Anang, Kejaksaan akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Polri, Kementerian Pertanian, dan pihak lainnya yang terlibat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung.

Amran menekankan momen penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran. Stok saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbing, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten). (rls,ant/lut)

"Kalau kita tertibkan ini, kita punya RP100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaikan 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaikan semua sekolah di seluruh Indonesia,"

PRABOWO SUBIANTO
Presiden RI

"Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics," kata Presiden Prabowo dalam peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin (21/7/2025).

Presiden Prabowo diantaranya terkait distribusi pangan nasional. Untuk itu, Presiden Prabowo menyerukan langkah konkret dalam menghadapi persoalan distribusi pangan nasional, khususnya praktik-praktik yang merugikan petani dan masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo menyebutkan salah satu fokus dalam "serakahnomics" ini adalah praktik curang di sektor penggilingan padi. Ia mengungkapkan sejumlah pelaku usaha besar diduga membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi.

"Penggilingan padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggilingan padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya



Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja dalam apat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). (parlementaria)

Komisi I DPR RI Soroti Celah pada UU Penyiaran

Komisi I DPR RI menihat masih ada beberapa celah dalam Undang-Undang (UU) Penyiaran. Anggota komisi banyak menyingung tentang celah yang bisa terjadi pada platform digital, mulai dari tumpang tindih dengan UU lainnya hingga fenomena filter bubble. Pandangan tersebut tertuang dalam rapat bersama para pakar dan akademisi terkait revisi UU Penyiaran digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menggarisbawahi urgensi definisi yang tepat mengenai konsep penyiaran dan pengawasan terhadap platform digital agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dengan UU lainnya, seperti UU ITE dan KUHP baru.

“Saya ingin bertanya kepada Prof. Masduki, bagaimana definisi penyiaran yang tepat menurut Prof? Karena saya masih belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan co-regulation. Kalau platform digital mau dimasukkan dalam RUU Penyiaran, bentuk co-regulation-nya seperti apa?” ujar Abraham dalam rapat bertema “Penyiaran Multiplatform dan Equal Playing Field di Bidang Penyiaran” itu.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai bahwa jika konsep co-regulation memberi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kewenangan dari hulu ke hilir yaitu mulai dari pendaftaran hingga pengawasan, maka hal ini bisa menimbulkan kerumitan, khususnya

jika mencakup seluruh platform digital, termasuk media sosial dan layanan game interaktif.

“Kalau KPI juga mengatur platform seperti X atau bahkan platform game yang ada fitur chatting-nya, ini akan menimbulkan problematika formal dan legal. Harus jelas batasannya. Kalau memang sejauh itu cakupannya, mungkin nama KPI juga harus diubah. Ini akan menimbulkan kebingungan secara hukum,” tegas Abraham.

Selain itu, Abraham juga menyoroti potensi tumpang tindih pengaturan pidana dalam RUU Penyiaran dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP baru. Ia menyatakan tidak sepakat jika ketentuan pidana dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran tanpa memperhatikan konsistensi antarregulasi.

“Dalam UU ITE terbaru, pengaturan pidana akan berlaku sampai KUHP baru berjalan. Kalau kita masukkan lagi ketentuan pidana dalam RUU Penyiaran, maka akan terjadi tumpang tindih. Apalagi KUHP yang baru sudah memuat ketentuan tentang kejahatan siber. Saya mengusulkan agar ketentuan pidana ini di-review ulang,” ujar Abraham.

Lebih jauh, Legislator Dapil DKI Jakarta II itu juga mempertanyakan bagaimana mendefinisikan dan membedakan secara tegas antara televisi konvensional dan platform

digital jika keduanya tetap dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran. Hal ini penting agar tidak terjadi perluasan wewenang yang berlebihan, terutama bagi lembaga seperti KPI.

“Saya sepakat bahwa TV konvensional dan platform digital adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita tetap mau masukkan ke dalam satu undang-undang, harus ada definisi yang jelas dan solusi konkret agar tidak menysasar ke semua platform digital seperti game atau

media sosial, yang bukan ranah penyiaran tradisional,” tegas Abraham.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, juga mengatakan perlunya penguatan regulasi dan lembaga pengawasan konten digital. Menurut legislator Dapil Kalteng ini mentakan bahwa saat ini tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang ITE atau community guidelines milik platform, karena tidak semua platform patuh.

“Di Undang-Undang ITE, ujaran kasar atau vulgar tidak termasuk pelanggaran. Lalu apakah kita perlu membentuk lembaga pengawas baru untuk media digital? Atau perluasan fungsi KPI agar menjangkau ranah

digital? Ini harus menjadi perhatian dalam revisi,” tegasnya.

Andina juga menyampaikan keprihatinan atas lemahnya kontrol konten sponsor pada platform digital. Ia menyebut masih banyak konten vulgar yang lolos karena tidak dikurasi secara memadai, meskipun platform mengklaim telah menerapkan community guidelines.

“Saya tidak sepakat kalau kita hanya bergantung pada community guidelines dari platform. Realitanya, banyak konten vulgar dan tidak pantas tetap lolos. Bahkan sponsor yang

masuk pun tidak dikurasi dengan baik. Ini jelas menunjukkan bahwa self-regulation belum cukup,” katanya.

Ia pun menekankan bahwa ekosistem penyiaran nasional sedang terdesak secara ekonomi dan geografis. Ia merujuk pada penurunan pendapatan televisi nasional hingga Rp3 triliun pada 2023, yang dinilainya sebagai sinyal krisis eksistensial bagi lembaga penyiaran di tengah penetrasi digital yang tidak merata.

“TV nasional masih sangat penting, terutama untuk menjangkau wilayah 3T. Tapi kalau mereka hancur karena kalah bersaing dengan platform digital yang tidak teratur, lalu bagaimana rakyat di pelosok bisa tetap terinformasi?” tegas Andina.

Andina juga menekankan pentingnya Revisi UU Penyiaran agar mampu menjawab tantangan ekosistem penyiaran digital masa kini. Revisi ini dinilainya tak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga mendesak secara sosial dan kultural, terutama menyangkut dampak platform digital terhadap generasi muda.

“Urgensi revisi ini sangat genting di zaman sekarang. Generasi muda kini hidup dalam arus konten digital yang tidak memiliki batasan seperti televisi konvensional. Kalau di TV ada KPI dan pengawasan, di live streaming orang bisa merokok, berbicara kasar, atau tampil seronok tanpa filter (pengawasan),” ujar Andini.

Politisi Fraksi NasDem tersebut kemudian menyoroti fenomena filter bubble yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Ahmad M. Ramli. Ia menanyakan terkait perlunya ketentuan dalam UU Penyiaran yang mewajibkan transparansi algoritma platform digital agar tidak hanya menampilkan konten sensasional yang mengabaikan keberadaan konten lokal atau edukatif.

“Apakah di RUU Penyiaran perlu ada pasal khusus soal transparansi algoritma platform digital? Karena sekarang, konten yang viral biasanya yang sensasional. Konten lokal, termasuk yang berkaitan dengan UMKM atau budaya daerah, tertutup dan sulit bersaing,” lanjut Andina.

Turut hadir dalam RDPU tersebut Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Prof. Dr. rer. soc. Masduki, dan Dr. Ignatius Haryanto Djoewanto sebagai narasumber utama dalam proses pendalaman substansi revisi Undang-Undang Penyiaran oleh Panja Penyiaran Komisi I DPR RI. (rls/lut)

“Dalam UU ITE terbaru, pengaturan pidana akan berlaku sampai KUHP baru berjalan. Kalau kita masukkan lagi ketentuan pidana dalam RUU Penyiaran, maka akan terjadi tumpang tindih. Apalagi KUHP yang baru sudah memuat ketentuan tentang kejahatan siber.”

ABRAHAM SRIDJAJA
Anggota Komisi I DPR RI

KARHUTLA SUMATERA JADI SOROTAN INTERNASIONAL

Wilayah Terbakar Meluas, Pemda Kewalahan

Wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Barat kian meluas di tengah cuaca kemarau yang melanda. Pemerintah daerah (Pemda) pun kewalahan memadamkan api karena sulit mengakses medan dan keterbatasan peralatan.



Regu Pemadam Kebakaran HSE Operations PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saat melaksanakan upaya pemadaman kebakaran berkolaborasi dengan stakeholders di Rokan Hilir, Riau. (dok)

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera kembali bikin heboh. Kali ini, media asal Amerika Serikat (AS), Associated Press, sampai ikut-ikutan menyoroti. Pasalnya, asap pekat dari beberapa wilayah di Pulau Sumatera itu sudah terdeteksi sampai ke Malaysia pada Minggu (20/7/2025).

"Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan masalah tahunan di Indonesia yang membebani hubungan dengan negara-negara tetangga," tulis Associated Press dalam artikelnya berjudul Forest Fire Haze from Indonesia Detected in Malaysia, dikutip Senin (21/7/2025).

Media AS itu juga mengingatkan, "Dalam beberapa tahun terakhir, asap dari kebakaran tersebut telah menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan." Ini jelas bukan masalah baru, tapi penyakit tahunan yang tak kunjung sembuh.

Associated Press mengutip Wakil Gubernur Riau Brigjen. Pol. Adrianto Jossy Kusumo. Disebutkan, salah satu biang kerok titik api memang berasal dari Provinsi Riau.

"Ia (Wakapolda) mengatakan lebih dari 140 kebakaran hutan dan lahan gambut dilaporkan terjadi di provinsi tersebut," tulis Associated Press.

Adrianto menjelaskan lebih detail, "Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu merupakan wilayah terdampak kebakaran terparah yang menghancurkan sekitar 46 hektar lahan di kedua kabupaten tersebut. Kebakaran ini mengakibatkan polusi kabut asap tebal di seluruh wilayah yang mengurangi jarak pandang hingga satu kilometer (setengah mil)."

Meski begitu, ada kabar baiknya sedikit. Adrianto menyebut, "Jumlah titik api turun dari 294 titik pada hari Sabtu setelah pihak berwenang berhasil memadamkan api di beberapa tempat." Setidaknya, upaya pemadaman membuahkan hasil.

Kondisi ini langsung disambut keluhan dari negeri jiran. Laman Malaysia, Malay Mail, dalam artikel bertajuk Unhealthy Air Quality in Peninsular Malaysia Doubles to Eight Areas in 24 Hours melaporkan bagaimana kualitas udara di Semenanjung Malaysia memburuk drastis.

Jumlah wilayah dengan kualitas udara tidak sehat melonjak dua kali lipat dalam semalam, berdasarkan data Sistem Manajemen Indeks Pencemaran Udara (APIMS) Departemen Lingkungan Hidup Malaysia.

"Hingga pukul 09.00 pagi ini,

delapan lokasi mencatat Indeks Pencemaran Udara (API) di atas 100," tulis Malay Mail pada Senin (21/7/2025).

"Yang paling parah terkena dampaknya adalah Alor Gajah di Melaka, dengan angka API 160," kata Malay Mail.

Tujuh wilayah lain yang juga merasakan efek kabut asap tak sehat ini adalah Temerloh di Pahang (API 156), Banting di Selangor (155), Nilai di Negeri Sembilan (155), Kemaman di Terengganu (153), Johan Setia di Selangor (152), Cheras di Kuala

Lumpur (151), dan Putrajaya (124)

Sekadar informasi, API antara 0-50 itu baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 sudah kategori berbahaya.

Meski begitu, Malaysia juga tak sepenuhnya menyalahkan. Malay Mail mengakui bahwa kebakaran hutan di dalam negeri mereka, seperti di Kajang Prima dan Bukit Jalil, juga menjadi penyebab lain.

"Salah satu kebakaran serupa di Kajang Prima pada 19 Juli menghancurkan 1,2 hektare lahan dan membutuhkan 22 petugas pemadam kebakaran dan empat unit mobil pemadam untuk mengendalikannya," sebut media itu.

"Kebakaran semak terpisah dilaporkan terjadi di dekat Bukit Jalil pada hari yang sama," lanjut mereka.

Namun, Malay Mail tetap menunjuk Indonesia sebagai penyebab utama. Dikatakan, negara tetangga Indonesia itu telah berjuang melawan karhutla yang diyakini sebagai sumber kabut asap selama beberapa hari terakhir. Indonesia pun disebut akan meningkatkan upaya penanganan, dimulai dengan penyemaian awan di Riau pada Senin ini. (wid,rls,ist/dya)

BNPB Kucurkan Rp 20 M atasi Kebakaran di Riau

PEMERINTAH mengungkap dana Rp 20 miliar dikucurkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto pun meminta penanganan dilakukan maksimal.

Suharyanto awalnya mengungkap berbagai upaya sudah dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya modifikasi cuaca yang dikakukan sejak Mei-Juli.

Kucuran dana miliaran itu diungkap setelah Kepala Pelaksana BPBD Riau Edy Afrizal meminta bantuan penanganan karhutla di Bumi Lancang Kuning. Khususnya terkait permintaan penambahan perlengkapan dan peralatan karhutla.

"Saran dari Pak Kalaksa ada bantuan untuk kota-kota perlengkapan, tentu saja ini bertahap sesuai kebutuhan. Makanya saya tadi, mohon maaf Pak Edy ya, kemarin kan baru saja dikasih Pak Menko banyak sekali perlengkapan sampai Rp 20 miliar itu nilai uangnya, itu kan sangat besar untuk ukuran kita saat ini. Tolong didistribusikan dulu ke daerah," kata Kepala BNPB kepada

Edy saat paparan, Senin (21/7/2025).

Meskipun begitu, BNPB sudah menambah helikopter untuk waterbombing dan patroli. Penambahan karena satu helikopter bantuan yang ada dalam kondisi rusak.

"Untuk heli kami juga tambahkan heli patroli dan WB sesuai saran Pak Kalaksa. Untuk hari ini ada satu kemarin siaga, tapi rusak. Tetapi kemarin sudah masuk lagi satu heli waterbombing," katanya.

Selanjutnya, pada Rabu (23/7/2025) mendatang akan ada tiga unit lagi heli waterbombing mendarat di Riau. Dengan begitu ada total lima unit helikopter waterbombing dipakai untuk pemadaman.

"Rabu kita masukkan tiga unit lagi, mudah-mudahan dengan paling tidak tiga, empat ini bisa membantu ketika operasi modifikasi cuacanya tidak menemukan awak untuk dijadikan hujan," katanya.

Suharyanto juga menegaskan Komandan Satgas Penanganan Karhutla di Provinsi Riau adalah Gubernur Abdul Wahid. Namun karena kesibukan, ia meminta

Komandan Korem Wira Bima Brigjen TNI Sugiono, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Danlanud Marsma TNI Abdul Haris untuk mengambil peran.

"Saya tegaskan di sini, untuk Komandan Satgas Riau adalah Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur kan sibuk, ya enggak mungkin. Jadi mohon nanti Pak Kapolda, Danrem, Danlanud berkoordinasi sama Kalakasa," katanya.

Terakhir, jenderal bintang tiga itu meminta semua pihak berkolaborasi menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab, ada 5 daerah lain yang juga masih butuh perhatian sebagai daerah prioritas karena rawan karhutla.

"Silahkan berkolaborasi Satgas Daerah, ingat bukan hanya Riau yang dipikirkan Kemenhut, Kemen LH, BNPB. Masih ada Jambi, Palembang (Sumsel), Kalbar, Kalsel, Kalteng itu 6 provinsi prioritas yang selalu kebakaran besar karena lahan gambut. Perhari ini Sumut dan Sumbar kebakaran, ini sementara dikesampingkan karena tidak pakai heli," katanya. (wid,rls,dtc/dya)

RI Darurat Perundungan di Satuan Pendidikan SEKITAR 20 SISWA ANIAYA MURID BARU SAAT MPLS SMPN DI BLITAR

Selain dianiaya, siswa kelas 1 SMP Negeri Doko Blitar ternyata juga diancam agar tidak bicara. Peristiwa perundungan dan penganiayaan itu terjadi di belakang toilet sekolah, pada Jumat (18/7/2025), pukul 08.00 WIB, saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung.

Indonesia darurat perundungan di satuan pendidikan bukanlah tuduhan tak berdasar. Belum reda kegaduhan kasus bully berujung maut yang dialami siswa di SMAN 6 Garut, Jawa Barat (Jabar) kini kondisi serupa terjadi di Jawa Timur (Jatim).

Seorang siswa SMP Negeri 3 Doko, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berinisial WV (12) menjadi korban kekerasan fisik oleh puluhan siswa lainnya hingga mengalami trauma mental dan luka fisik. Aksi pengeroyokan yang rekaman videonya viral di media sosial itu terjadi pada Jumat (18/7/2025) di lingkungan sekolah selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru.

Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon Suwito Pratomo mengatakan, korban WV merupakan siswa baru di sekolah tersebut yang menjadi korban perundungan oleh 20 siswa lain dari sekolah yang sama. "Korban berinisial WV, siswa kelas 7 berusia 12 tahun, menjadi korban bullying dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok siswa kelas 8 hingga 9. Pelaku sekitar 20 anak," ujar Momon kepada awak media, Senin (21/7/2025).

Meski demikian, kata Momon, terdapat juga sejumlah pelaku yang merupakan siswa baru sesama kelas 7. Menurut Momon, akibat pengeroyokan itu, WV, warga Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, mengalami luka fisik dan trauma psikis sepulang sekolah. Momon mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan keterangan korban, insiden bermula saat kegiatan MPLS berlangsung. Saat itu, korban dipanggil oleh kakak kelas dan diajak menuju ke belakang kamar mandi

sekolah.

"Lalu, seorang siswa kelas 8 berinisial NTN memulai aksi kekerasan dengan memukul pipi kiri korban dan menendang bagian perutnya," ujar Momon. Pemukulan yang dilakukan NTN itu, kata Momon, memancing siswa lainnya untuk ikut melakukan pengeroyokan secara bersama-sama.

Setelah kejadian, kata dia, korban kembali ke kelas tetapi tetap dalam kondisi trauma. "Korban kembali diancam oleh sejumlah pelaku utama agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada guru maupun orangtuanya," ujar Momon.

Karena ketakutan, korban sempat merahasiakan kejadian itu tetapi akhirnya menceritakan semuanya sepulang sekolah. Momon mengatakan bahwa pihaknya kini telah melakukan sejumlah langkah,



Tangkapan layar video saat seorang siswa SMP Negeri 3 Doko, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berinisial WV (12) menjadi korban kekerasan fisik di sekolah. (ist)

termasuk meminta keterangan dua guru sekolah, yakni Wasilah Turrohmah (guru BK) dan Ahmad Safrudin.

"Kami juga telah melakukan olah TKP serta pemeriksaan medis (VER) terhadap korban dengan hasil luka di siku kanan, nyeri di kepala belakang, dan nyeri di dada," ucapnya.

Momon memastikan, pihaknya terus memproses hukum insiden tersebut meskipun baik pelaku maupun korban sama-sama masih anak di bawah umur.

Sementara itu, Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa bullying tersebut.

"Kekerasan dan bullying di lingkungan pendidikan adalah

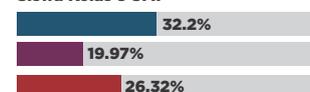
tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun. Anak-anak harus tumbuh dalam suasana yang mendukung, bukan dalam ketakutan," ujar Arif.(wid,ant,ist/dya)

DATA KASUS PERUNDUNGAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN (2022)

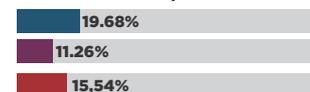
Siswa Kelas 5 SD



Siswa Kelas 8 SMP

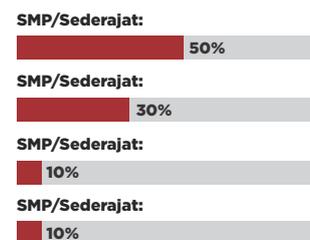


Siswa Kelas 11 SMA/SMK



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

DATA KASUS PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN (2023)



Sumber: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Gerakan Setop 'Bullying' dan Kenaikan Jumlah Kasus

AKSI perundungan ini ternyata kerap terjadi di lingkungan sekolah. Dilansir dari data yang dilaporkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di sekolah. Perlu digarisbawahi, jumlah tersebut hanya yang terjadi di sekolah, tidak termasuk yang di luar sekolah.

JPPI mencatat pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan didominasi oleh guru sebanyak 43 persen atau 229 orang. Adapun provinsi yang paling banyak melaporkan perundungan di lingkungan pendidikan adalah Jawa Timur (81 kasus), Jawa Barat (56 kasus), Jawa Tengah (45 kasus), Banten (32 kasus), dan Jakarta (30 kasus).

Sementara berdasarkan data yang diungkap KPAI dan FSGI, kasus bullying meningkat tajam secara nasional. Data tahun 2023, ada 1,478 kasus bullying dilaporkan. Sedangkan pada 2022, terdapat 266 kasus, 53 kejadian pada 2021, dan 119 peristiwa di 2020. Adapun jenis-jenisnya, bullying yang umum terjadi antara lain bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, cyberbullying, dan bullying emosional.

Untuk menekan perundungan, gerakan anti-bullying atau setop bullying di Indonesia mulai muncul dan mendapatkan perhatian lebih luas seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif bullying. Meskipun tidak ada satu tanggal pasti yang menjadi awal gerakan ini, namun beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perlindungan anak dan kampanye anti-bullying telah menjadi pendorongnya. Berbagai sumber menyebutkan gerakan ini semakin terlihat tahun 2010-an, seiring dengan munculnya berbagai kampanye dan program pencegahan bullying di sekolah dan masyarakat.

Kasus perundungan tak bisa dilepaskan dari ranah hukum. Persoalannya, publik banyak tidak mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk dibawa ke masalah pidana guna menyelesaikan kasus bullying.

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menekankan semua orang sepakat bullying harus disetop. Namun ia mencermati tidak banyak yang tahu bagaimana posisi bullying di dalam hukum, sehingga tidak ada deterrence effect yang teraktivasi karena kebanyakan dari orang tua

dan sekolah tidak tahu bahwa sesungguhnya bullying merupakan pidana. Bahkan sangat patut didudukkan sebagai pidana serius.

Reza juga mengamati semua fokus pada preventif, tapi mitigasi apalagi represifnya vakum, seolah tidak tersedia piranti hukum. Padahal, ketika masyarakat tahu tentang bagaimana konstruksi pidana terhadap bullying, maka itu diharapkan akan membuat pelaku atau calon pelaku berpikir ulang sebelum melakukan bullying. "Korban, keluarga, dan sekolah pun jadi paham bagaimana prosedur meminta pertanggungjawaban pelaku," kata Reza.(wis,rls/dya)

Beras Oplosan Ditemukan Beredar di Pasar hingga Toko Modern Kota Malang

MALANG - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang menemukan puluhan kilogram beras kemasan yang terindikasi oplosan, di sejumlah pasar tradisional dan toko ritel modern. Temuan itu terungkap saat dikukukannya inspeksi mendadak (sidak) bersama Satgas Pangan Polresta Malang Kota.

"Terkait beras oplosan yang saat ini menjadi perhatian, memang ada ditemukan di beberapa merk. Ini berdasarkan sidak kami pada minggu kemarin, ke beberapa toko dan kios kios yang lainnya," ujar Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, Senin (21/7/2025).

Slamet menyebutkan, Pasar Dinoyo serta sejumlah ritel modern di kawasan Bumiayu, Buring, Polehan, Kedungkandang, Sawojajar, dan Mojolangu, menjadi sasaran sidak dan pengawasan.

Di Pasar Dinoyo, menurutnya, petugas mendapati beras merk Fortune dan Sania yang terindikasi beras oplosan. Temuan itu berasal dari beberapa toko, dengan volume per

toko berkisar antara 10 hingga 25 kilogram.

"Di pasar Dinoyo, itu beberapa toko ditemukan menjual beras yang ditengarai oplosan, yaitu merk fortune dan Sania. Rata-rata volumen di masing-masing toko itu 10 sampai dengan 25 kilogram," katanya.

Tak hanya di pasar tradisional, di ritel modern pun ditemukan beras dari beberapa merk lain yang diindikasikan serupa. Beberapa merk yang terjaring sidak di toko ritel modern adalah Sania, Sentra Ramos, Sentra Pulen, Raja Platinum, dan Raja Ultima.

Volume beras yang ditemukan di tiap toko ritel modern rata-rata di atas 30 kilogram. "Setelah kami periksa, di kemasan beras tersebut banyak yang tidak mencantumkan nomor izin edar. Selain itu, ada juga kemasan yang tidak sesuai spesifikasi, terutama dari tingkat broken (pecahan beras) dan warna berasnya," jelas Slamet.

Temuan ini, lanjutnya, kini menjadi bahan koordinasi berkelanjutan antara Dispangtan dan Satgas Pangan. Salah satu langkah yang akan diambil

adalah mengonfirmasi langsung kepada pihak produsen, yakni Wilmar Group dan PT Food Station Tjipinang.

Sedangkan, berdasarkan informasi yang diterima Dispangtan, PT Food Station menyatakan sudah tidak lagi mengirimkan beras produksinya ke wilayah Jawa Timur sejak Juni 2025.

Sebelumnya, diketahui pada pertengahan Juli 2025 lalu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket. Yang dikemas seolah-olah premium, namun kualitas dan kuantitasnya menipu.

Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian

Dispangtan bersama Satgas Pangan Kota Malang melakukan sidak beras oplosan di pasar dan ritel-ritel modern. (dok. Dispangtan Kota Malang)



(Kementan) bersama Satgas Pangan. Yang menunjukkan sebanyak 212 merk beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. (Santi/Dya)

Program 1.000 Sarjana Ditanggung APBD: Pemkot Batu Gandeng 17 Perguruan Tinggi



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Batu dengan salah satu dari 17 perguruan tinggi untuk program 1.000 Sarjana. (Santi/Lentera)

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menggandeng 17 perguruan tinggi di Jawa Timur (Jatim) merealisasikan pelaksanaan program 1.000 sarjana. Melalui kerja sama ini dipastikan seluruh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta program akan ditanggung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sebagai keberpihakan pemerintah, akan dibantu UKT 100 persen gratis dari APBD. Ini komitmen kami selama proses kuliah hingga berakhir. Termasuk juga kami bekerjasama dengan PTKIN. Jadi ambil kuota agar lebih fokus belajar karena tidak harus memikirkan bagaimana bayar UKT," ujar Wali Kota Batu, Nurochman, Senin (21/7/2025).

Untuk diketahui, program 1.000 sarjana merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman dan Heli Syuanto, yang dijalankan selama lima tahun ke depan.

Melalui program ini, menurutnya, Pemkot Batu berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakatnya hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

"Visi misi kami relevan dengan kondisi Kota Batu. Persaingan di masa

depan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sinergi bersama dunia kampus agar kebijakan pemerintah bisa berdampak pada masyarakat," kata pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur ini.

Lebih lanjut, menurutnya, beasiswa pendidikan diberikan secara penuh kepada anak-anak Kota Batu yang memenuhi kriteria. Mulai dari yang berprestasi, dari keluarga kurang mampu, hingga para penghafal Al-Quran.

Tak hanya itu, program ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM, penggiat koperasi, dan perangkat desa melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkot Batu telah memperluas kerja sama pendidikan dengan 17 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Timur.

Salah satunya, pada Senin (21/7/2025) ini, Pemkot Batu telah mendandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Unisma. "Hal ini menjadi bagian dari implementasi program 1.000 sarjana yang diharapkan dapat memberikan

dampak langsung bagi peningkatan kualitas SDM Kota Batu," ungkap Cak Nur.

Selain kerja sama di bidang pendidikan, pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Batu periode 2019-2024, ini juga berharap perguruan tinggi, dapat mendukung Pemkot Batu dalam melakukan riset dan kajian strategis.

Dinilainya, riset sangat dibutuhkan terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Batu.

"Kami targetnya kunjungan 10 juta wisatawan dalam setahun. Tetapi apakah punya dampak langsung ke pertanian, kan tidak. Pertanian tidak tersentuh mayoritas kebijakan. Kami mohon dibantu untuk merekomendasikan melakukan riset, kajian tentang pertanian," kata Cak Nur.

Dengan langkah ini, pihaknya berharap kebijakan pendidikan dan pengembangan SDM yang diambil dapat terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat. Sekaligus membuka peluang penguatan sektor ekonomi strategis di Kota Batu. (Santi/Dya)



Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato utamanya pada upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 dan Pertemuan Terkait di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (9/7/2025). (Antara)

Desakan agar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengundurkan diri tengah menjadi perbincangan hangat. Aksi unjuk rasa bertajuk 'Turun Anwar' pun dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli mendatang.

Demo 'Turun Anwar' ini awalnya direncanakan oleh oposisi Perikatan Nasional. Mereka mengklaim akan ada 300 ribu orang yang berpartisipasi dalam demo tersebut.

Kepolisian Malaysia mengungkapkan diperkirakan sekitar 10 ribu hingga 15 ribu orang akan turun ke jalan untuk demo 'Turun Anwar'. Plt Kepala Kepolisian Kuala Lumpur, Datuk Mohamed Usuf Jan Mohamad mengatakan pihak penyelenggara telah memberi tahu Kepolisian Distrik Dang Wangi terkait rencana demo.

Dia mengungkapkan sekitar 2 ribu petugas kepolisian akan ditugaskan untuk membantu mengamankan demo dan memastikan keselamatan demonstran dan masyarakat umum.

"Kami akan mengatur situasi sebaik mungkin. Perkiraan awal dari Cabang Khusus demo akan dihadiri sekitar 10 ribu hingga 15 ribu orang," katanya, dikutip dari New Straits Times, Senin (21/7/2025).

"Saya mendesak semua pihak untuk berperilaku damai dan tertib. Mohon bertanggung jawab dan menahan diri dari segala bentuk provokasi," katanya lagi dalam konferensi pers.

Dia juga mengeluarkan peringatan keras kepada siapa pun yang terbukti menghasut kerusuhan akan menghadapi tindakan keras tanpa kompromi.

"Meski hak untuk berkumpul dan menyuarakan berpendapat dilindungi, ia mengingatkan hak tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan cara

yang mengancam ketertiban umum, utamanya untuk hal-hal sensitif seperti ras, agama, dan kerajaan," tuturnya.

"Jika memungkinkan, hindari membakar barang dan menggunakan pengeras suara yang berlebihan seperti demo-demo sebelumnya. Mari kita semua ingat bahwa menjaga keamanan nasional merupakan tanggung jawab bersama," lanjutnya.

Pemungutan Mosi Tak Percaya

Sementara itu, Anwar Ibrahim menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi pemungutan suara mosi tak percaya apa pun yang akan dilakukan di parlemen. Pernyataan itu menanggapi oposisi yang mendesaknya untuk mengundurkan diri.

Anwar Ibrahim juga mengungkap-

DEMONSTRASI MASSAL ANCAM POSISI PM ANWAR IBRAHIM

kan telah memberi tahu Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk mengizinkan mosi tak percaya jika diajukan.

"Jika ada mosi hari ini, di hari pertama parlemen, saya akan menunggu pemungutan suara mosi tak percaya. Jika muncul suara mayoritas, silakan. Itulah sistem kami," katanya dalam rapat bulanan Departemen Perdana Menteri.

Dia juga menekankan setiap usaha untuk menggulingkan pemerintah di luar jalur konstitusi merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat mengancam stabilitas nasional.

"Mereka bilang tidak mau menunggu pemilihan umum. Mereka ingin memaksa pemerintah untuk berubah sekarang. Ini bertentangan dengan prinsip konstitusi dan hukum," ujarnya.

"Tidak masalah mengkritik saya, menyebut perdana menteri tidak dapat memerintah dan harus digantikan juga tak masalah. Anda bahkan bisa merencanakan

seseorang yang lebih baik untuk mengambil alih saya tidak masalah. Tapi jika tindakan itu berujung pada kekacauan, maka tidak ada negara yang akan aman. Semua yang telah kita capai akan hilang jika stabilitas politik dan nasional tidak dapat dijamin," lanjutnya.

Sementara itu, sekretaris politik Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Shamsul Iskandar menegaskan hal itu hanya upaya politik kelompok kecil yang berupaya mempertahankan keberadaannya, seraya mengatakan protes itu bukan wujud nyata ketidakpuasan rakyat kepada kepemimpinan Anwar Ibrahim.

"(Protes) Ini bukan tentang rakyat, ini tentang sekelompok kecil yang mencoba membalikkan apa yang gagal mereka capai melalui kotak suara," kata Shamsul Iskandar di Kuala Lumpur, Senin (21/7/2025), sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Malaysia BERNAMA. (New Straits Times, Antara, ist/nei)

Proses Hukum

Kasus Pelecehan Seksual Ditunda Sementara

PENGADILAN Banding Malaysia menyetujui permohonan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menghentikan sementara seluruh proses gugatan perdata yang diajukan oleh mantan stafnya, yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual pada tahun 2018.

Majelis hakim yang terdiri dari tiga orang secara bulat memutuskan untuk menangguhkan proses persidangan dalam sidang yang dibacakan pada Senin (21/7/2025) oleh Hakim Pengadilan Banding Che Mohd Ruzima Ghazali.

Secara terpisah, Anwar juga sedang mengajukan banding atas keputusan pengadilan sebelumnya yang menolak upayanya meminta kejelasan dari Mahkamah Federal terkait apakah seorang perdana menteri yang sedang menjabat dapat digugat berdasarkan tindakan sebelum menjabat. Pengadilan telah menetapkan tanggal 2 September untuk pengelolaan kasus guna

menentukan jadwal banding tersebut.

"Dalam permohonan penangguhan, kami menemukan bahwa penangguhan harus diberikan karena terdapat keadaan khusus," ujar Ruzima. "Jika tidak ada penangguhan, maka proses banding akan menjadi tidak berarti."

Keputusan ini memberikan jeda bagi Anwar, yang sebelumnya pernah menghadapi tuduhan sodomi dan penyalahgunaan kekuasaan—tuduhan yang ia bantah. Tuduhan tersebut, yang menurut Anwar bermotif politik, mencuat setelah krisis finansial Asia 1997-1998, saat ia menjabat sebagai wakil perdana menteri sebelum akhirnya diberhentikan dari kabinet.

Yusoff Rawther, mantan staf riset Anwar, menggugatnya secara perdata pada 2021, menuduh Anwar melakukan pelecehan seksual pada Oktober 2018 di kediaman Anwar di Kuala Lumpur. Anwar, yang dilantik

sebagai perdana menteri pada 2022, membantah semua tuduhan. Yusoff menuntut ganti rugi khusus, umum, tambahan, dan teladan.

Pengacara Anwar, Allan Wong, berargumen bahwa jika gugatan tetap berlanjut sebelum proses banding diselesaikan, Anwar akan terdistraksi dari tugas-tugas kenegaraan, terkena dampak politis yang merugikan, dan berada dalam posisi kelembagaan yang rentan.

Anwar meminta Mahkamah Federal untuk menilai apakah kelanjutan gugatan ini akan mengganggu kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai perdana menteri dan merusak prinsip konstitusional pemisahan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan tentang mencari kekebalan pribadi atau menghindari proses hukum, dan bahwa ia akan tetap menjalankan tanggung jawabnya tanpa gangguan maupun kompromi. (Bloomberg, ist/nei)

Mengenal Insufisiensi Vena Kronis yang Dialami Trump

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan mengalami insufisiensi vena kronis, suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan pembengkakan pada kaki dan memar di tangan. Mengutip Al Jazeera, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kondisi tersebut bersifat ringan dan cukup umum terjadi. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah yang menghambat aliran darah secara normal, sebagaimana disampaikan pada Kamis (17/7/2025).

Apa Itu Insufisiensi Vena Kronis?

Insufisiensi vena kronis (chronic venous insufficiency (CVI) masalah kesehatan menghambat aliran darah bebas dari kaki ke jantung karena kerusakan vena.

Akibatnya, darah terkumpul di kaki menyebabkan peningkatan tekanan di bagian tersebut, hingga bisa berakibat pecah kapiler jika kondisi ini tak segera ditangani, menurut situs web Cleveland Clinic. Kapiler yang pecah menyebabkan memar yang membuat kulit berwarna cokelat kemerahan di area tersebut, serta peradangan, kerusakan jaringan, dan bisul.

Insufisiensi vena kronis gangguan medis yang sangat umum. Di Amerika, kondisi ini dialami 40 persen masyarakat di sana, yakni orang paruh baya dan lanjut usia, menurut Society for Vascular Surgery. "Vena, terutama yang melewati batas bawah adalah

struktur ber dinding sangat tipis dan memiliki katup. Ketika Anda berdiri darah tidak mengalir deras ke kaki Anda. Katup-katup ini menutup, tetapi seiring waktu, katup-katup ini dapat mengalami disfungsi," kata ahli bedah Niten Signh, dikutip dari NPR.

Penyebab

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kondisi ini timbul ketika katup di pembuluh vena kaki tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi penumpukan darah di dalam vena tungkai. Tak hanya itu, insufisiensi vena kronik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Kelainan Bawaan

Kelainan bawaan adalah salah satu penyebab penyakit IVK pada seseorang. Kelainan bawaan adalah kelainan pada pembuluh vena tungkai kaki yang dimiliki sejak lahir, seperti katup vena yang lemah atau bahkan terdapat beberapa kasus dimana orang lahir tanpa mempunyai katup di pembuluh darah vena khaki.

Perubahan pada Pembuluh Vena

Selain kelainan bawaan, IVK juga dapat disebabkan karena terjadinya perubahan pada pembuluh vena. Misalnya, pembuluh vena yang melebar sehingga menghalangi katup untuk menutup sepenuhnya.

Penyakit Lain yang Merusak Pembuluh Vena Khaki

Masalah medis seperti trombosis vena dalam (DVT) bisa menjadi penyebab IVK. DVT terjadi ketika terdapat gumpalan darah di dalam pembuluh vena dalam, biasanya di kaki atau panggul. Gumpalan darah ini kemudian dapat

menyebabkan blokade atau penyumbatan pada aliran darah di pembuluh vena tersebut.

Ketika terjadi DVT, gumpalan darah yang terbentuk dapat meninggalkan luka atau jaringan parut. Jaringan parut ini dapat merusak struktur pembuluh vena dan katup di dalamnya. Akibatnya, pembuluh vena jadi melebar dan katup vena tidak dapat berfungsi dengan baik.

Selain penyebab di atas, penyakit ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan duduk atau berdiri terlalu lama, kurang aktivitas atau olahraga, kebiasaan merokok, berat badan berlebih, kehamilan, atau tekanan darah tinggi yang semuanya dapat memengaruhi kinerja pembuluh darah vena.

Gejala

Menurut Joshua A. Beckman, selaku Komite Penasihat Kesehatan Vaskular American Heart Association, sangat penting menyadari gejala insufisiensi vena kronis, sehingga cepat mendapat pertolongan medis.

Menurut situs web American Heart Association, gejala insufisiensi vena kronis meliputi edema atau pembengkakan, varises, dan perubahan kulit. Perubahan kulit ini umumnya disebut eksim vena atau dermatitis stasis.

Gejala yang muncul yaitu bercak merah,

gatal, atau bersisik di tungkai bawah akibat aliran darah yang buruk dan ulserasi.

Diagnosis dan Penanganan

Diagnosis insufisiensi vena kronis dilakukan dengan menggunakan teknologi pencitraan canggih, seperti ultrasonografi dupleks yang mendeteksi aliran balik darah atau penyumbatan. Kemudian dapat pula digunakan veografi resonansi magnetik (MRV) atau venografi tomografi terkomputasi (CVT) untuk melihat struktur dan fungsi vena secara rinci.

Sementara untuk penanganan insufisiensi vena kronis dilakukan secara bertahap dan bergantung pada tingkat keparahan kondisi. Terapi utama meliputi penggunaan terapi kompresi, termasuk perban multilapis, pakaian elastis, stoking kompresi bertingkat, serta pompa pneumatik untuk membantu aliran balik darah.

Selain itu, dokter juga dapat meresepkan obat antiinflamasi topikal, antibiotik, atau diuretik untuk mengatasi peradangan, infeksi, ataupun penumpukan cairan.

Pasien insufisiensi vena kronis juga dapat menjalani terapi endovaskular intervensional. Prosedur ini bersifat invasif minimal dan dilakukan dengan memasukkan kateter melalui sayatan kecil di selangkangan.

Dengan bantuan pencitraan ultrasonografi, kateter diarahkan ke lokasi penyumbatan untuk menghilangkan obstruksi dan memulihkan aliran darah. (ne,ist/dya)





Ilmuan Ungkap Sel Telur Bisa Segar 50 Tahun

Para ilmuwan dari Centre for Genomic Regulation (CRG) di Barcelona mengungkap bahwa sel telur manusia dapat tetap bertahan segar selama puluhan tahun karena menerapkan mekanisme 'penghemat energi' dalam proses pembuangan limbah di dalam sel. Penemuan ini dipublikasikan pada 16 Juli dalam jurnal The EMBO Journal.

Dalam penelitian itu, diketahui bahwa sel telur secara sengaja memperlambat kerja sistem pembuangan limbah internal seperti lisosom dan proteasom saat proses pematangan berlangsung. Pendekatan ini diyakini sebagai hasil adaptasi evolusioner untuk menjaga aktivitas metabolisme tetap rendah dan mengurangi risiko kerusakan pada sel.

"Dengan meneliti lebih dari seratus sel telur yang baru didonorkan, kami menemukan cara minimalis untuk membantu sel tetap bersih selama bertahun-tahun," kata Dr. Elvan Böke, penulis koresponden studi dan pemimpin grup riset di CRG, dikutip dari Science Daily, Senin

(21/7/2025)

Sejak lahir, perempuan memiliki sekitar satu hingga dua juta sel telur yang belum matang, namun jumlah ini terus berkurang hingga hanya beberapa ratus menjelang menopause atau ujung siklus menstruasi. Setiap sel telur harus mampu bertahan tanpa rusak selama puluhan tahun sebelum digunakan saat kehamilan.

Dalam studi ini, menurut peneliti, energi dari siklus daur ulang protein lisosom dan proteasom dapat menghasilkan reactive oxygen species (ROS)—molekul berbahaya yang dapat merusak DNA dan membran. Meski tidak mengukur ROS secara langsung, para peneliti menduga bahwa sel telur memperlambat proses daur ulang guna meminimalkan ROS, namun tetap menjalankan fungsi 'housekeeping' yang cukup untuk

bertahan hidup.

Penemuan ini memperkuat studi dari tim yang sama pada 2022, menunjukkan bahwa oosit—sel telur yang belum matang—manusia sengaja melewati reaksi metabolik penting untuk menekan produksi ROS. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa sel telur memiliki berbagai cara untuk menurunkan daya demi menjaga diri dari kerusakan dalam jangka panjang.

Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan lebih dari 100 sel telur dari 21 donor sehat berusia 19–34 tahun di klinik fertilitas Dexeus Mujer di Barcelona. Sebanyak 70 sel telur telah matang dan siap dibuahi, sementara 30 lainnya masih dalam tahap oosit belum matang.

Dengan teknik pencitraan dengan pewarna fluoresen, para ilmuwan melacak aktivitas lisosom, proteasom, dan mitokondria dalam sel hidup. Ketiga indikator tersebut ditemukan sekitar 50 persen lebih rendah dibandingkan sel pendukung di sekitarnya, dan semakin menurun seiring kematangan sel telur.

Pengamatan langsung juga menunjukkan bahwa menjelang ovulasi, sel telur membuang lisosom ke cairan sekitarnya, sementara mitokondria dan proteasom bergerak ke tepi luar sel. "Ini semacam pembersihan besar-besaran yang sebelumnya tidak kami ketahui bisa dilakukan oleh sel telur manusia," ujar Dr. Gabriele Zaffagnini, penulis utama studi.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya menggunakan sel telur matang buatan di laboratorium, riset ini menjadi studi berskala terbesar terhadap sel telur manusia sehat yang dikumpulkan langsung dari tubuh perempuan. Oosit matang buatan cenderung berperilaku abnormal dan terkait dengan rendahnya keberhasilan fertilisasi in-vitro (IVF).

Penelitian ini berpotensi membuka jalan bagi strategi baru untuk meningkatkan angka keberhasilan IVF, yang mencapai jutaan siklus tiap tahun secara global. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Cuci Muka Pakai Es Batu, Tren Baru Bikin Kulit Sehat

Cuci muka merupakan langkah penting yang tak boleh dilewatkan dalam rutinitas perawatan kulit. Umumnya, kita menggunakan sabun wajah atau scrub untuk membersihkan sekaligus melakukan eksfoliasi. Namun, belakangan ini muncul tren baru yang sedang banyak diminati, yaitu mencuci wajah menggunakan es batu.

Es batu sering digunakan sebagai kompres dingin untuk meredakan pembengkakan dan peradangan di tubuh, misalnya akibat gigitan serangga atau cedera otot. Tidak hanya mengatasi kondisi medis pada tubuh, es batu juga dapat memberikan beragam manfaat kecantikan.

Di media sosial TikTok misalnya, banyak influencer hingga warganet ramai membagikan rutinitas cuci muka ini. Tren ini cukup unik. Alih-alih membasuh wajah dengan tangan seperti biasa, tren ini dilakukan dengan memasukkan es batu dalam baskom berisi air lalu mencelupkan ke dalamnya selama beberapa detik.

Beberapa influencer bahkan menggunakan air ber-pH tinggi untuk 'ritual' cuci muka ini. Banyak yang menganggap cara cuci muka ini ribet dan tak praktis. Namun siapa sangka tren satu ini ternyata punya manfaat yang baik untuk kulit. Apa saja itu? Berikut manfaatnya.

Mengurangi Pembengkakan Pada Wajah

Dilansir Healthline, es batu dapat membantu mengurangi bengkak pada area wajah, terutama di area mata. Efek dingin pada wajah akan menyempitkan pembuluh darah, sehingga bisa menghambat aliran darah dan mencegah sel-sel inflamasi.

Kalau Ladies habis begadang karena nonton drakor atau kerjaan yang menumpuk, sepertinya kamu bisa mencuci wajah dengan es batu saat esok pagi. Nantinya wajah akan tetap fresh dan tidak terlihat sehabis berjaga semalaman.

Menenangkan Jerawat Meradang

Selain efektif meredakan pembengkakan, es batu juga dikenal mampu mengatasi jerawat yang sedang meradang. Hal ini karena es memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi kemerahan, nyeri, dan pembengkakan pada jerawat aktif. Sensasi dingin dari es membantu menenangkan area yang teriritasi, sehingga proses penyembuhan jerawat bisa berlangsung lebih cepat.

Bagi kamu yang sedang berjuang melawan jerawat atau dikenal sebagai acne fighter, teknik sederhana ini layak dicoba. Mengompres wajah dengan es batu secara rutin dapat menjadi salah satu langkah perawatan alami untuk meredakan peradangan. Namun, pastikan untuk membungkus es dengan kain bersih agar kulit tidak mengalami iritasi akibat kontak langsung dengan suhu dingin yang ekstrem.

Mengurangi Tanda-tanda Penuaan

Semua orang pasti ingin tampak awet muda meskipun sudah tua. Dikutip dari Vogue, sensasi dingin dari es batu dapat membantu mengurangi tampilan garis-garis halus dan kerutan, terutama di area wajah yang sering menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti sekitar mata, dahi, dan mulut.

Efek dingin ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah sementara waktu, sehingga kulit tampak lebih kencang dan segar.

Menenangkan Kulit yang Terbakar Sinar Matahari

Hidup di negara tropis membuat kita sering terpapar sinar matahari sepanjang hari. Jika terlalu lama berada di luar ruangan tanpa perlindungan seperti sunscreen, kulit bisa mengalami kemerahan hingga terasa perih akibat sunburn.

Untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman tersebut, mencuci wajah dengan es batu dapat menjadi solusi sederhana. Efek dinginnya mampu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan yang muncul akibat paparan sinar matahari berlebih.

Membuat Kulit Lebih Bercahaya

Es batu dapat memberikan efek glowing alami pada kulit wajah. Sensasi dingin yang ditimbulkan membantu melancarkan sirkulasi darah, sehingga wajah tampak lebih segar dan cerah secara alami. Aliran darah yang lebih lancar ini juga membantu menutrisi kulit dari dalam, membuatnya terlihat lebih hidup dan tidak kusam.

Mengurangi Produksi Minyak di Wajah

Manfaat es batu untuk wajah lainnya adalah membantu mengurangi produksi minyak atau sebum berlebih. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemilik kulit berminyak yang rentan terhadap jerawat dan komedo. Kandungan air dingin dari es batu dapat memberikan efek menyegarkan sekaligus menenangkan kulit.

Selain itu, es batu juga membantu mengecilkan pori-pori wajah. Pori-pori yang mengecil akan membuat wajah tampak lebih halus dan sehat, serta mencegah kotoran dan minyak masuk terlalu dalam ke dalam kulit. Dengan

penggunaan rutin dan tepat, es batu dapat menjadi perawatan sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan minyak di wajah.

Menyamarkan Kantung Mata

Selain mengontrol minyak berlebih, manfaat es batu untuk wajah berikutnya adalah membantu menyamarkan kantung mata.

Munculnya kantung mata membuat siapa saja jadi kurang percaya diri, dan menggunakan es batu sebelum tidur bisa membantu meringankan kondisi ini.

Cukup kompres mata dengan es batu selama beberapa saat. Pijat-pijat secara perlahan sehingga rasa dingin bisa memasuki kulit dan membantu melancarkan sirkulasi darah pada area tersebut. Itu tadi beberapa manfaat es batu untuk wajah.

(nei,ist/dya)



Celah Korupsi (dari Hal 1) ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mendeteksi potensi penyimpangan atau korupsi dalam tata kelola dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu ditemukan saat koordinasi dan supervisi, kemudian KPK juga memberikan rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan Pemprov Jatim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa temuan ini menjadi bagian pengintegrasian upaya penindakan-pencegahan korupsi, mengingat saat ini KPK juga sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

"Provinsi Jawa Timur secara rutin menerima alokasi hibah dalam jumlah cukup besar. Dalam periode tahun 2023 hingga 2025, total anggaran hibah mencapai Rp12,47 triliun, dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 20.000 lembaga," kata Budi, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara, lanjut Budi, dalam penyaluran hibah tersebut telah diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pergub Jatim Nomor 44 Tahun 2021 dan Pergub Jatim Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Budi menjelaskan pada Pergub terbaru (No.7/2024) mengatur sejumlah perbaikan, seperti penambahan BUMDes sebagai penerima hibah dan persyaratan khusus untuk koperasi. Sayangnya, regulasi ini belum mengatur secara tegas sanksi terhadap penerima hibah fiktif dan belum menetapkan kriteria pokmas insidental secara jelas.

Budi menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi KPK, pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius dan juga menjadi celah untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan sendiri. Celah tersebut diantaranya adalah karena minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi menjadi faktor utama yang membuka celah bagi praktik koruptif.

KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan hibah, antara lain:

Verifikasi penerima hibah tidak profesional, sehingga masih ditemukan pokmas fiktif dan duplikasi penerima. "Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK)," kata Budi.

Budi juga mengungkapkan pengaturan jatah hibah oleh pimpinan DPRD juga berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar dalam pembahasan anggaran. Bahkan diantaranya adalah ijon dan pemotongan dana hibah tersebut. Dan dua itulah yang kini dalam proses penyidikan KPK.

Terkait dengan pemotongan, Budi m e n a n d a s k a n b a h w a pemotongannya bisa sampai 30%. "Pemotongan dana hibah hingga 30% oleh koordinator lapangan, terdiri dari 20% untuk 'ijon' kepada anggota DPRD dan 10% untuk keuntungan pribadi," tandasnya.

Celah lainnya, lanjut Budi, adalah ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, akibat pengkondisian proyek oleh pihak luar. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan dan evaluasi, terbukti dari 133 lembaga penerima hibah yang melakukan penyimpangan dengan total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp2,9 miliar, di mana Rp1,3 miliar belum dikembalikan.

"Selain itu, Bank Jatim sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) belum memiliki prosedur pencairan hibah yang memadai, sehingga proses penyaluran dana hibah dilakukan seperti transaksi biasa tanpa verifikasi keamanan," katanya.

Melihat berbagai potensi terjadinya korupsi dalam dana hibah Jatim ini, maka KPK juga mengeliarkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola hibah. Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang meliputi: Penajaman tujuan pemberian hibah agar selaras dengan program prioritas daerah.

Selain itu, KPK juga merekomendasikan adanya penetapan kriteria penerima hibah yang selektif dan berbasis indikator terukur. Pemerintah juga harus melakukan transparansi dalam verifikasi dan seleksi penerima hibah. Serta selanjutnya, KPK merekomendasikan supaya pembangunan database terintegrasi antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Kemudian, Budi juga menekankan supaya dalam penyaluran dana hibah juga perlu didukung teknologi. Dengan demikis digitalisasi sistem informasi hibah yang dapat diakses publik secara real time sangat diperlukan.

Budi menambahkan rekomendasi itu juga menekankan pada penguatan

mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan public dan terakhir adalah Kolaborasi dengan Bank RKUD untuk merancang mekanisme pencairan hibah yang akuntabel.

KPK juga akan melibet sejumlah lembaga dan pemerintah pusat untuk merumuskan regulasi nasional terkait porsi hibah dalam APBD, menguatkan regulasi kriteria penerima hibah untuk mencegah manipulasi organisasi, menyusun data tunggal nasional berbasis NIK untuk verifikasi lintas instansi.

Kemudian, rekomendasi selanjutnya adalah supaya membangun platform digital hibah yang terintegrasi antar instansi pusat dan daerah dan menyusun rekomendasi nasional pencegahan korupsi hibah dalam perencanaan dan penganggaran.

"KPK menegaskan bahwa hibah daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi tata kelola hibah di Jawa Timur diharapkan menjadi model perbaikan bagi daerah lain dalam mencegah praktik korupsi dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan," tandas Budi.

Disatu sisi, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ini menunjukkan adanya skema yang terstruktur dan berlapis. Seperti yang diuraikan di atas, system "ijon" terjadi di dana hibah Jatim, bahkan terbongkarnya kasus ini juga bermula dari adanya "ijon" yang diberikan penerima proyek pada DPR RI yang punya kedudukan cukup mentereng. "ijon" atau setoran awal yang diminta oleh anggota DPRD Jatim dari koordinator kelompok masyarakat (pokmas) sebagai imbalan atas pengusulan dana hibah. Misalnya, seorang koordinator pokmas yang mendapatkan 10 proyek senilai Rp 2 miliar diminta uang ijon sebesar 2% atau Rp 40 juta per proyek.

Kemudian, skema terstruktur dan berlapis ini juga bisa dilihat dari peran. Anggota DPRD provinsi, melalui jaringan kepercayaannya di kabupaten bahkan desa, diduga menjadi perantara atau pengusul dana hibah. Kelompok-kelompok lokal ini kemudian menjadi penerima dana, baik langsung maupun sebagai perantara, bahkan di beberapa kasus, hibah malah diperjualbelikan.

Bahkan ada sinyalir juga melibatkan Multi Level: Korupsi ini melibatkan banyak level, mulai dari provinsi (DPRD Jatim), kabupaten, kecamatan, hingga desa. Keterlibatan ini bergerak melalui jalur politik yang sangat pragmatis.

Sampai saat ini, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan kasus ini, termasuk mantan pimpinan DPRD Jatim (seperti Kusnadi), anggota DPRD

lainnya, aparat desa, pengurus partai, hingga pihak swasta.

KPK secara maraton memanggil dan memeriksa banyak saksi, termasuk kepala desa di berbagai kabupaten seperti Malang dan Pasuruan dan lainnya. Selain itu juga ada serta telah menyita asset asset yang diduga terkait dengan kasus Dana "Hibah". Diantara asset yang berhasil disita masih tetap aktif melakukan pernyataan aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, seperti tanah dan rumah mewah senilai miliaran rupiah.

Keterlibatan banyak pihak ini menghasilkan modus operandi yang beragam, termasuk pengaturan jatah dana hibah, penggunaan rekening ganda dimana KPK menemukan 757 rekening dengan identitas yang sama, sehingga pembelian aset diduga dari hasil korupsi.

Nah, KPK juga terius menangani masalah ini. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Ini menunjukkan komitmen KPK untuk membongkar jaringan korupsi secara menyeluruh.

Sedangkan dalam proses penyidikan KPK terus mencari data dan keterangan di Jatim. Terbaru, KPK memanggil 17 saksi untuk diperiksa di Polres Malang. "Pemeriksaan atas nama HA, RUS, ARB, MMN, RNT, SB, MH, SUP, BS, SW, SAM, LDH, AHF, YS, BJR, RUS, dan AS," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Lebih lanjut Budi menjelaskan identitas saksi HA, RUS, ARB, dan MMN merupakan pihak swasta. Untuk saksi lain di antaranya adalah perangkat Desa Karanganyar, Kepala Desa Ngantru, Kades Simojayan Ampel Gading, Kades Gedok Kulon, direktur di PT Piala Mas Industri, Lurah Plaosan, anggota Badan Permusyawaratan Desa Plaosan, dan Kepala Dusun Patuksari.

Kemudian Ketua Yayasan Bina Swadaya Masyarakat, Penasihat PSM Tunas Lintas Perempuan, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jatim, aparat sipil negara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan direktur utama di PT Putera Tjandra Nyata.

Untuk penyidikan kasus tersebut, Senin (14/7/2025), KPK sempat memanggil anggota DPRD Kota Blitar, Jatim, Yohan Tri Waluyo, dan empat pihak swasta berinisial PS, HU, SC, dan TH sebagai saksi.

Kemudian, pada Selasa (15/7/2025), KPK memanggil Kades Jeding berinisial KMD, Kades Penataran berinisial KTN, Kades Candirejo berinisial SPM, Kadus Kalicilik Candirejo berinisial YNT, Kades Bangsa berinisial SDK, dan dua pihak swasta berinisial BAP dan MFH. (rls,ant/lut)



DPRD Surabaya Apresiasi RPJMD 2025–2029

ARIF FATHONI: LANGKAH TRANSFORMASI SURABAYA MENUJU KOTA KELAS DUNIA

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan optimismenya terhadap masa depan Kota Pahlawan. Ditegaskannya, Kota Surabaya akan bertransformasi menjadi kota kelas dunia dalam lima tahun ke depan.

Keyakinan itu mencuat usai menyimak hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Surabaya dalam merumuskan prioritas pembangunan kota 2025–2029.

"Ketika membaca hasil rangkuman kerja Pansus RPJMD, kami optimistis Surabaya akan bertransformasi menjadi kota kelas dunia. Karena dalam RPJMD sudah disusun prioritas-prioritas kota dalam lima tahun ke depan," kata Fathoni, Senin (21/7/2025).

Politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, pada 2026 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan penyelesaian persoalan infrastruktur dasar di wilayah perkampungan.

Hal ini meliputi perbaikan saluran air, pavingisasi, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Kalau itu sudah tuntas di 2026, maka mulai 2027 hingga 2029, Insyaallah fokusnya tinggal mempercantik kota dan membenahi wajah Surabaya agar sejajar dengan kota-kota kelas dunia lainnya," jelasnya.

Jalur Lingkar Luar Barat

Fathoni menyebut, tantangan utama perkotaan di Surabaya yakni banjir dan kemacetan. Namun, Pemkot dinilai sudah menyiapkan solusi strategis, seperti pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan sistem saluran yang saling terkoneksi.

"Dengan adanya JLLB serta sistem saluran yang saling terhubung, mudah-mudahan warga Surabaya bisa menikmati kota yang genangannya cepat surut dan kemacetan yang semakin minim," harapnya.

Tak hanya itu, Fathoni juga



Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni (Tengah)

menyoroti capaian Surabaya di bidang pendidikan dan kesehatan yang telah melampaui ketentuan nasional.

"Undang-undang mewajibkan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan, Surabaya justru mengalokasikan 20,7 persen. Jadi layanan pendidikan dasar dan kesehatan sudah cukup baik," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, RPJMD 2025–2029 disusun dengan visi besar menjadikan Surabaya sebagai kota dunia dalam lima tahun ke depan.

Ia menyebut, sejumlah proyek strategis dan peningkatan layanan masyarakat akan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Surabaya.

Salah satu prioritas utama yang dicanangkan adalah pengembangan sistem transportasi umum massal guna mengurai kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga.

"Dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota dunia harus didukung dengan fasilitas transportasi yang memadai," sebutnya.

Selain itu, Eri menuturkan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan menjadi fokus pembangunan. Menurutnya, Pemkot akan terus menggenjot sektor

pendidikan dan kesehatan hingga tahun 2030, termasuk peningkatan rata-rata lama sekolah.

"Peningkatan IPM juga akan menjadi fokus kami, pada sektor pendidikan dan kesehatan akan terus dikejar hingga tahun 2030, termasuk peningkatan lama sekolah," imbuhnya.

Meski demikian, Eri menekankan bahwa pembangunan Surabaya sebagai kota dunia tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi.

"Seperti yang kita lihat, kota-kota dunia yang berhasil itu adalah kegiatan dilakukan bersama dengan seluruh elemen, termasuk masyarakatnya. Bukan berarti ketika ada pergerakan bersama, bantuan bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya, pemerintah lepas tangan. Tidak," tegasnya.

Ia meyakini, dengan kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, pertumbuhan IPM dan ekonomi akan semakin cepat, sejalan dengan semangat RPJMD ini.

"RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran mulai tahun 2026 hingga 2027, dengan sasaran yang telah disepakati hingga tahun 2030," tutupnya. (Adv/Ama)



Ketika membaca hasil rangkuman kerja Pansus RPJMD, kami optimistis Surabaya akan bertransformasi menjadi kota kelas dunia. Karena dalam RPJMD sudah disusun prioritas-prioritas kota dalam lima tahun ke depan,"

ARIF FATHONI

Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya